

**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**



**BKPSDM
Kabupaten
Temanggung**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu *“Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tinggi”* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp8.073.770.663,00.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 03 Juli 2023

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660508 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	29
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.....	43
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	48
2.5. Inovasi BKPSDM	56
2.6. Penghargaan	58
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	59
3.1. Telaahan terhadap arah Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	59
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	63
4.1. Program dan Kegiatan	62
BAB V : PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Tahun 2022	11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Triwulan I Tahun 2022	20
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2023 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	30
Tabel 2.4. IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..	38
Tabel 2.5. Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..	39
Tabel 2.6. Penyusunan Formasi Pegawai Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	39
Tabel 2.7. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	39
Tabel 2.8. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	40
Tabel 2.9. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2018-2022	40
Tabel 2.10. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.11. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.12. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.13. Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	42
Tabel 2.14. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	42
Tabel 2.15. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	42
Tabel 2.16. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	43
Tabel 2.17. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	50
Tabel 2.18. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022	56

Tabel 2.19. Daftar Penghargaan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022	58
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024	61
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024	64
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024	67

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan

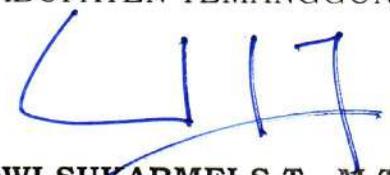

Rinawati Heri Prastuti, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Petugas Verifikator


Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

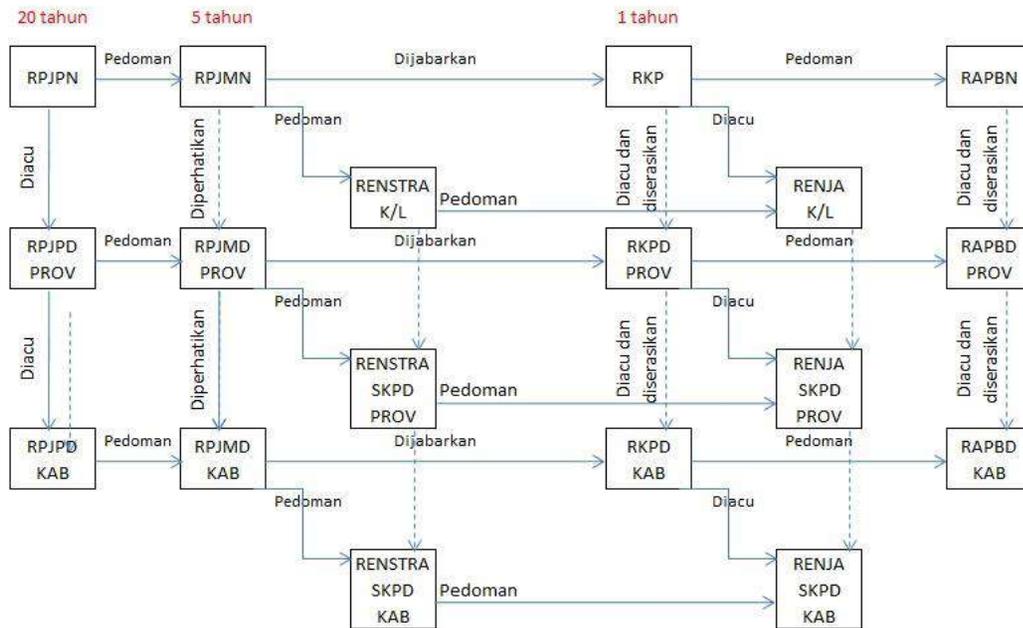
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja BKPSDM Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 2) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM;
- 4) Data Pokok Pembangunan BKPSDM;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan renstra BKPSDM;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra BKPSDM;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau

kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM. Namun dalam proses ini BKPSDM mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BKPSDM terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang

dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM;

Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra BKPSDM 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Tahun 2022

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Indeks Merit System

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2022			Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	BIDANG KEPEGAWAIAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	a Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			141,600,000	96,594,490		11,030,900		34,513,278		69,276,528		82,536,828		82,536,828			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		12	5,000,000	5,000,000	3	434,000	3	1,399,500	3	3,505,500	3	4,948,000	12	4,948,000	100	98.96	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya ATK		12	21,000,000	21,000,000	3	3,351,500	3	7,335,600	3	15,140,900	3	20,665,300	12	20,665,300	100	98.41	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	15,600,000	15,600,000	3	2,175,400	3	5,194,200	3	9,435,200	3	13,293,900	12	13,293,900	100	85.22	
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu		12	30,000,000	14,999,990	3	99,000	3	1,284,000	3	2,927,800	3	3,855,300	12	3,855,300	100	25.70	

	5 Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12	70,000,000	39,994,500	3	4,971,000	3	19,299,978	3	38,267,128	3	39,774,328	12	39,774,328	100	99.45	
	b Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57,000,000														
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330,997,750	323,764,750		72,317,332		138,871,871		206,194,754		274,360,523		274,360,523			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, materai dan benda pos		12	8,000,000	5,000,000	3	658,500	3	1,134,500	3	1,390,500	3	2,352,500	12	2,352,500	100	47.05	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12	48,000,000	53,000,000	3	9,025,429	3	17,494,549	3	26,200,463	3	34,601,413	12	34,601,413	100	65.29	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor		12	274,997,750	265,764,750	3	62,633,403	3	120,242,822	3	178,603,791	3	237,406,610	12	237,406,610	100	89.33	
	d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165,000,000	132,994,967		14,241,446		39,056,892		73,155,392		118,262,224		118,262,224			

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	90,000,000	99,998,000	3	11,776,446	3	34,481,892	3	59,795,392	3	93,843,224	12	93,843,224	100	93.85
	2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebel		12	3,000,000	3,000,000	3	0	3	-	3	-	3	3,000,000	12	3,000,000	100	100.00
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor		12	35,000,000	24,999,762	3	2,165,000	3	4,275,000	3	13,060,000	3	19,430,000	12	19,430,000	100	77.72
	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		12	30,000,000													
	5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		12	7,000,000	4,997,205	3	300,000	3	300,000	3	300,000	3	1,989,000	12	1,989,000	100	39.80
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																		100	
Predikat																		Sangat Tinggi	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																		
	a	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				335,000,000	362,500,000		8,102,500		17,208,400		33,253,700		124,272,600		124,272,600		
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100				100		100		100		100		100		100	
		Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu	%	100				100		99.25		99.58		100		100		100	

		Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu	%	100			37.04		37.04		94.60		100		100		100		
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100			100		87,39		100		100		100		100		
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	80			83.48		90.94		88.91		86.51		86.51		100		
		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	47			43.44		42,28		42.41		42.09		42.09		89.56		
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3			0		0		0		0.02		0.02		100		
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90			0		0		0		14.29		14.29		15.87		
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95			79.33		86,05		88.30		100		100		100		
	1	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	1	270,000,000	327,500,000	3	2,673,000	3	6,574,000	3	13,020,500	3	89,999,700	3	89,999,700	100	27.48	
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	kartu/sk	400	30,000,000	15,000,000	284	1,582,500	376	2,941,500	527	10,310,300	619	14,364,150	619	14,364,150	100	95.76	

	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dan terlaksananya update data kepegawaian PNS	OPD / record	24/5000	35,000,000	20,000,000	46/4614	3,847,000	46/5648	7,692,900	46/6911	9,922,900	46/12219	19,908,750	46/12219	19,908,750	100	99.54
	b	Mutasi dan Promosi ASN				260,000,000	165,000,000	1,382	36,822,500	1,386	122,105,000	1,731	149,420,300		159,097,100		159,097,100		
	1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Diserahkan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS (ex Pengangkatan PNS)	keg / org	0	50,000,000	15,000,000	884	1,823,000	884	6,860,500	884	12,086,300	884	14,916,800	884	14,916,800	100	99.45
			Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (Ex. Penataan sistem administrasi KP)	SK	1000			494		494		833		833		833		83.30	
	2	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	Dokumen	12	210,000,000	150,000,000	2	34,999,500	5	115,244,500	8	137,334,000	12	144,180,300	12	144,180,300	100	96.12
			Terlaksananya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kgt	1			1		1		1		1		1		100	
			Terlaksananya prosesi pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK	kgt	6			1		2		5		5		5		83.33	
	c	Pengembangan Kompetensi ASN				83,000,000	40,000,000	432	1,372,000	438	15,872,000	487	16,861,700		39,152,750		39,152,750		
	1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	3	21,000,000	30,000,000		0	2	10,000,000	2	10,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000	100	100.00
	2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terbinanya tim PAK dan pejabat fungsional	PD/SK	250	17,000,000	10,000,000	432	1,372,000	436	5,872,000	485	6,861,700	485	9,152,750	485	9,152,750	100	91.53
	3	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya assessment center bagi PNS	byte		45,000,000													

	d Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				115,000,000	38,759,800		1,390,000		5,031,225		13,172,432		17,515,032		17,515,032			
	1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab. Temanggung	Perbup	1	30,000,000	7,999,900		955,000		1,605,000		2,404,100	1	2,536,100	1	2,536,100	100	31.70	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	unit kerja/ OPD	46						7		8		8			17.39		
	2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satyaencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (Penghargaan Satya lencana karya satya)	dokumen/ orang	1 / 50	15,000,000	9,000,000	0		0	2,681,225	124	4,405,225	124	5,601,125	124	5,601,125	100		
		Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	orang	3			1		1		1		3		3		100		
	3 Pembinaan Disiplin ASN	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian	orang	140	50,000,000	15,000,000	0	355,000	0	665,000	0	6,283,107	140	6,894,807	140	6,894,807	100	45.97	
		Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain	unit kerja/ OPD	25			3		3		10		10		10		40.00		
		Tercetaknya ID Card bagi ASN	buah	1200			51		51		150		150		150		12.50		

	4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Diberikannya surat/SK hukuman disiplin pada PNS yang in disiplin sebagai bentuk pembinaan	orang	15	20,000,000	6,759,900	-	80,000	-	80,000	-	80,000	1	2,483,000	1	2,483,000	6.67	36.73
			Terselesaikannya SK izin perceraian	SK/orang	15			11		13		16		21		21		100	
																		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2	80,18
																		Predikat	Tinggi
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG KEPEGAWAIAN	90,09		
																PREDIKAT	Sangat Tinggi		
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG KEPEGAWAIAN	89.49		
																PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		
B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
			Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	32			21.29		18.09		29.31		30.13		30.13		94.15	
			Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	13.5			0.22		15.60		16.25		16.50		16.50		100	
	a	Pengembangan Kompetensi Teknis				100,000,000	0												

	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya bimtek mandiri	orang	4	100,000,000	-													
	b Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,600,000,000	4,881,500,000		7,833,500		81,671,350		1,190,569,765		3,630,307,009		3,630,307,009			
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD	orang	884	1,600,000,000	4,881,500,000		7,833,500	160	81,671,350	399	1,190,569,765	884	3,630,307,009	884	3,630,307,009	100	74.37	
		Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III dan IV	orang	3			0		0		3		3		3		100		
		Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi	orang	112			3		151		176		176		176		100		
		Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	orang	25			10		10		10		10		10		40.00		
																		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	85.00

											Predikat	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	85.00		
											PREDIKAT	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	97.08		
											PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		
JUMLAH			3,187,597,750	6,041,114,007		153,110,178		454,330,016		1,751,904,571		4,445,504,066	4,445,504,066	
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	87.54		
											PREDIKAT	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	93.28		
											PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Triwulan I Tahun 2023

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Indeks Merit System

No	Bidang / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	BIDANG KEPEGAWAIAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	a Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			135,600,000	135,594,410		11,480,000							11,480,000	100			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		12	3,600,000	3,599,910	3	85,000							3	85,000	100	2.36	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya ATK		12	20,000,000	19,999,500	3	2,194,500							3	2,194,500	100	10.97	
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	20,000,000	20,000,000	3	2,321,000							3	2,321,000	100	11.61	
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu		12	42,000,000	41,995,000	3	3,617,000							3	3,617,000	100	8.61	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12	50,000,000	50,000,000	3	3,262,500							3	3,262,500	100	6.53	
	b Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19,000,000														
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292,607,000	304,605,900		68,676,449							68,676,449				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, materai dan benda pos	12	5,000,000	5,000,000	3	21,500						3	21,500	100	0.43		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	40,000,000	39,999,000	3	8,661,095						3	8,661,095	100	21.65		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor	12	247,607,000	259,606,900	3	59,993,854						3	59,993,854	100	23.11		
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171,000,000	108,995,020		9,854,272							9,854,272				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	80,000,000	80,000,000	3	9,654,272						3	9,654,272	100	12.07		
2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebel	12	2,000,000	1,997,500	3	0						3	0	100	0.00		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12	25,000,000	25,000,000	3	200,000						3	200,000	100	0.80		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12	62,000,000			0							0				
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12	2,000,000	1,997,520	3	0						3	0	100	0.00		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1		92		

														Predikat	Sangat Tinggi		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																
	a Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				290,000,000	237,833,500		18,913,600							18,913,600		
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100			100							100		100	
		Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu	%	100			100							100		100	
		Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu	%	100			100.00							100		100	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100			100							100		100	
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	80			90.46							90		100	
		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	47			41.99							42		89.34	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3			0.05							0		100	
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90			50.00							50		55.56	
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95			34.64							35		100	
	1 Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tersedianya data formasi pegawai dan seleksi ASN	Dokumen	1	260,000,000	212,834,000	2	17,602,250						2	17,602,250	100	8.27

	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Diterbitkannya dan diserahkan KARIS / KARSU, KARPEG dan SK pensiun	kartu/sk	400	10,000,000	9,999,500	87	1,311,350						87	1,311,350	100	13.11
	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dan terlaksananya update data kepegawaian PNS	OPD / record	24/5000	20,000,000	15,000,000	46/3554	0						46/3554	0	92.28	0.00
	b Mutasi dan Promosi ASN					135,000,000	70,000,000	1,318	16,720,500						16,720,500			
	1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Diserahkannya SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS (ex Pengangkatan PNS)	keg / org	0	15,000,000	10,000,000	884	2,144,500						884	2,144,500	100	21.45
			Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (Ex. Penataan sistem administrasi KP)	SK	1000			426							426	0	42.60	
	2	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	Dokumen	12	120,000,000	60,000,000	6	14,576,000						6	14,576,000	50	24.29
			Terlaksananya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kgt	1			-							0	0	0	
			Terlaksananya prosesi pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK	kgt	6			2							2	0	33.33	
	c Pengembangan Kompetensi ASN					1,065,000,000	144,766,000	821	542,200						821	542,200	100	5
	1	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya assessment center bagi PNS	byte		1,000,000,000	134,766,000		0						0	0		
	2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	3	50,000,000	-		0						0	0	0	
	3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terbinanya tim PAK dan pejabat fungsional	PD/SK	250	15,000,000	10,000,000	821	542,200						821	542,200	100	5.42
	d Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					75,000,000	29,999,600		2,662,250						2,662,250			
	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab.	Perbup	1	22,000,000	9,999,800	1	875,000						1	875,000	100	8.75

														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG KEPEGAWAIAN	93.88	
														PREDIKAT	AKAN TERCAPAI	
B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
		Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	32			28.60							28.60		89.38
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	13.5			0.29							0.29		100
	a Pengembangan Kompetensi Teknis				200,000,000	30,000,000		3,452,500							3,452,500	
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya bimtek mandiri	orang	4	200,000,000	30,000,000	10	3,452,500							3,452,500	
	b Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				411,000,000	330,890,000		1,661,500							1,661,500	

1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD	orang	884	411,000,000	330,890,000	884	1,661,500						884	1,661,500	100	0.50
		Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III dan IV	orang	3										0		0	
		Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi	orang	112										18		100	
		Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	orang	25			8							0		0.00	
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1		60.00	
														Predikat		Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		60.00	
														PREDIKAT		Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		94.69	
														PREDIKAT		UPAYA KERAS	
JUMLAH					2,794,207,000	1,392,684,430	133,963,271	0	0	0			133,963,271				
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		65.60	
														PREDIKAT		Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		94.28	
														PREDIKAT		UPAYA KERAS	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (83,30%)
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 2) Pembinaan Disiplin ASN
- e. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub Kegiatan sbb:
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
 - 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah:
 - b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang ditargetkan 100% namun capaian kinerjanya hanya 6,67% adalah karena kasus terjadi/dilaporkan pada akhir tahun 2022, sehingga pada akhir tahun tersebut masih dalam proses penanganan kasus, sehingga belum dapat diterbitkan SK pelanggaran disiplinya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa BKPSDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran dengan

kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,25%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian;

Capaian Kinerja : 97,25 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka indeks	49	50.03	50.05	50.07	50.09	51.7	50.03	51.24	53.13	53.16	100	TT
2	Indeks Sistem Merit	angka indeks	n.a	n.a	0.41	0.51	0,61	-	-	0.259	0.482	0.482	79.02	UK
3	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
4	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
5	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99.81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
6	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	80	80	80	80	80	77.48	76.38	90.33	86.51	90.46	100	TT
7	Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	45.5	46	47	47	48	45.81	46.79	46.96	42.09	41.99	87.47	UK
8	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.22	0.25	0.25	0.02	0.05	100	TT
9	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	90	90	90	90	100	100	86.67	14.29	50.00	55.56	UK
10	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	80	85	90	95	95	100	100	100	100	34.64	36.46	UK
11	Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	n.a	95	100	100	100	n.a	n.a	100	100.00	100.00	100	TT
12	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat	%	37.6	27.08	29.69	32	35	37.91	27.08	25.08	30.13	28.60	81.72	UK

	kepemimpinan													
13	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi diklat teknis dan fungsional	%	3	4.5	9	13.5	18	4.87	7.36	14.57	16.50	17.01	94.50	UK
	Jumlah Indikator Sasaran	2	Rata rata capaian kinerja sasaran										89,51	
	Jumlah Indikator Program	11	Rata rata capaian kinerja program										87,36	
	Jumlah semua Indikator	13	Rata rata capaian perangkat daerah										88,43	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran PD

a. Indeks Profesionalitas ASN dengan status telah tercapai.

Penghitungan pencapaian IP ASN sebelum tahun tahun 2022 masih berdasarkan hasil hitungan secara manual dengan data yang ada di BKPSDM dan belum mendapatkan verifikasi dari BKN. Verifikasi dari BKN untuk mendapatkan nilai ASN Kabupaten Temanggung baru diketahui pada awal triwulan II tahun 2022, karena di akhir tahun 2021 data kinerja (nilai P2KP) belum terunggah di aplikasi SAPK/IP ASN. Pada awal tahun 2022, BKN telah mengupdate data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK.

Capaian IP ASN triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 53,16 lebih tinggi 3,09 dari target yang direncanakan yaitu 50,07. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN. Meskipun capaian IP ASN tahun 2023 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan telah mencapai dari target yang direncanakan, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah.

Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut/rekomendasi indikator ini adalah :

- 1) Faktor Pendorong: Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di PD dan atau update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi MySAPK dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri.
- 2) Faktor penghambat: belum terkoneksinya Data Kepegawaian dengan perhitungan Indeks
- 3) Rekomendasi/tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/mengeluarkan nilai indeks.

b. Indeks Merit System dengan status perlu upaya keras

Pengukuran pengembangan karir dengan sistem merit baru dilakukan pada Tahun 2021, capaian kinerja indikator ini tahun 2021 merupakan hasil verifikasi dari KASN terhadap bukti dukung aspek-aspek penilaian sistem merit di tahun 2020.

Pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri dengan cara mengunggah data dukung aspek aspek sistem merit lewat aplikasi *sipinter*, dan baru mendapatkan penilaian/verifikasi dari KASN di bulan November 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian *merit system* yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skor *merit system* tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021.

Pada Triwulan I 2023 ini capaian kinerja sasaran indeks sistem merit masih menggunakan hasil penilaian sistem merit dari KASN tahun 2022 dengan nilai yang diperoleh sebesar 200 atau indeks sebesar 0,482 dan kategori kurang. Hasil tersebut belum sesuai target capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0,61. Penyebab masih belum tercapainya target tersebut antara lain:

1. Aspek Pengembangan Karir, yaitu belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum dapat merumuskan kesenjangan (*gap*) kompetensi dan kualifikasi. Tindak lanjut yang dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan.
2. Aspek Promosi dan Mutasi, yaitu belum memiliki rencana suksesi *by system* untuk seluruh pegawai. Tindak lanjut yang dilakukan menyusun rencana suksesi dari hasil asesmen yang kemudian diinput dalam aplikasi *sinta merit*.
3. Aspek Manajemen Kinerja, yaitu belum menyusun kesenjangan (*gap*) kinerja. Tindak Lanjut yang dilakukan membangun aplikasi 360°.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator kinerja indeks sistem merit maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menggunakan sistem merit dalam pengelolaan manajemen PNS berupa Peraturan Bupati.

2. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kebutuhan akan SDM yang mendesak karena pegawai pensiun dan mutasi sehingga semua PD mengusulkan formasi kebutuhan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a) Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan peta jabatan yang ada
 - b) Beberapa jenjang JF belum terakomodir dalam peta jabatan yang ada
 - c) Pengusulan kebutuhan SDM menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terbatas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan bimtek/diklat penghitungan dan koordinasi internal di BKPSDM dan Koordinasi yang intensif dengan Bagian Ortala Setda.
 - b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran pegawai agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran gaji pensiunan, sehingga memacu untuk mengusulkan pensiun 6 bulan - 1 tahun sebelum BUP. Semakin meningkatnya Pelayanan Administrasi urusan pensiun di BKN, adanya kerjasama dan kinerja yang baik antar pengelola kepegawaian tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun dan pegawai yang akan pensiun belum/tidak upload pdf dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui e-file di Simpeg.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran dan sosialisasi kepada yang menangani kepegawaian atau PNS yang akan pensiun agar melakukan update data dan upload dokumen elektronik di SIMPEG serta oordinasi yang intensif dengan PD dan BKN.
- c. Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat PNS tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS dan tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a. Berkas belum lengkap.
 - b. Proses verifikasi hingga terbitnya SK menunggu Pertek BKN yang memakan waktu lama.
 - c. Keterlambatan upload dokumen P2KP dan SKP dikarenakan ada perubahan peraturan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengoptimalkan personil/SDM pengampu usul kenaikan pangkat (petugas verifikator, petugas input data SAPK dan petugas upload dokumen di DocuDigital BKN) serta mengoptimalkan komunikasi dengan PD dan BKN.
- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah angka kredit yang sudah mencukupi untuk naik jabatan fungsional dan setelah itu keinginan untuk proses usul kenaikan pangkat karena sk pengangkatan dan kenaikan jabatan merupakan salah persyaratan kenaikan pangkat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah perlu ketelitian dalam proses verifikasi usulan JF, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berbeda bagi masing-masing jabatan fungsional yang ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah: dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi pengusul.

- e. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jababat Pengawas.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, dan adanya penyederhanaan birokrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta diklatpim, dan dilakukan assessment/talenta terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk diproyeksikan menduduki jabatan struktural.
 - f. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.
3. Capaian indikator Program dengan status Upaya Keras ada 5 terdiri dari:
- a. Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menambah kuota peserta diklatpim, khususnya

perempuan

- b. Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kinerja pengelola kepegawaian PD yang konsisten mengirimkan update data kepegawaiannya ke BKPSDM dan adanya SIMPEG Online memudahkan pengiriman/update data kepegawaian secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bukti fisik terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ update data kepegawaian yang dilakukan.
- c. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah atasan langsung segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terjadinya kasus pada akhir triwulan I sehingga pada saat tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di bulan/triwulan/tahun berkenaan.
- d. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perencanaan pengukuran target kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada dan komitmen peserta diklat untuk lulus diklat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat, dan adanya refocusing anggaran
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY.

- e. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
- 1) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah dengan adanya Covid -19 pada T.A 2020 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF sehingga mengurangi target peserta bimtek, sehingga berdampak pada capaian indikator di tahun 2023.
 - 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan komunikasi ke BPSDMD untuk penyelenggaraan Bimtek TF secara virtual.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Pembangunan pada BKPSDM Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok capaian Indikator sasaran perangkat Daerah dan Data Pokok Bidang pendukung capaian indikator kinerja program dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok capaian indikator sasaran Perangkat Daerah
 - a. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kualifikasi	9	10,34	10,82	11,907	12,39
2.	Kompetensi	7	11,48	9,15	9,343	12,73
3.	Kinerja	25	25,07	25,09	25	23,01
4.	Disiplin	5	4,95	4,97	4,997	5
TOTAL		46	51,74	50,03	51,247	53,13

b. Indeks Merit System

Realisasi Indeks Merit System tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021	2022
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	218	113	200
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	0,52	0,259	0,482

2. Data Pokok Pendukung capaian Indikator Program

a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai

Tabel 2.6
Penyusunan Formasi Pegawai
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perangkat daerah yang menyusun formasi dan terverifikasi	48	47	47	46	46
2.	Jumlah perangkat daerah	48	47	47	46	46
3.	Persentase Penyusunan formasi Pegawai	100	100	100	100	100

b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu.

Tabel 2.7
Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat	304	366	381	424	378
2	SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun	304	366	381	424	378
3	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

- c. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu.

Tabel 2.8
Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat	1.034	1.020	1.053	915	833
2	SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT	1.032	1.020	1.053	915	833
3	Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat tepat waktu (%)	99,81	100	100	100	100

- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional

Tabel 2.9
Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional	n.a	n.a	n.a	377	203
2	SK Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional yang terbit	n.a	n.a	n.a	377	203
3	Persentase Penyelesaian Usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional (%)	n.a	n.a	n.a	100%	100%

- e. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan.

Tabel 2.10

Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	253	240	169	157	141
2	Jumlah pejabat	710	633	624	626	481
3	Persentase pejabat yang memiliki kompetensi diklat PIM (%)	35,63	37,91	27,08	25,08	30,13

- f. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Tabel 2.11

Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	678	325	462	861	1.047
2	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	10,00	4,87	7,36	14,57	16,50

- g. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

Tabel 2.12

Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Jabatan Terisi	710	633	624	626	468
2	Jumlah Jabatan Kosong	36	184	193	67	73
3	Jumlah formasi jabatan	746	817	817	693	541
4	Persentase Keterisian Jabatan	95,17	77,48	76,37	90,33	86,51

- h. Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas

Tabel 2.13
Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pejabat Perempuan	318	290	292	294	197
2	Jabatan Terisi	710	633	624	626	468
3	Jumlah formasi jabatan	44,79	45,81	46,79	46,796	42,09

- i. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.14
Persentase Pelanggaran Disiplin ASN
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	12	15	16	15	1
2	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
3	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0,17	0,22	0,25	0,25	0,02

- j. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.15
Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SK Hukuman Disiplin yang terbit	7	17	15	13	1
2	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin ASN yang masuk	7	17	15	15	7
3	Persentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100	100	100	86,67	14,29

k. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian

Tabel 2.16

Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah data PNS yang terverifikasi	1.797	5.023	5.760	6.256	12.219
2	Jumlah PNS yang mengusulkan updating data	1.797	5.023	5.760	6.256	12.219
3	Persentase Updating data kepegawaian	100	100	100	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM dari 13 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Indeks *Merit System*

Angka indeks *merit system* masih rendah disebabkan oleh belum terpenuhinya bobot nilai di beberapa sub aspek pada aspek yaitu:

1) Aspek Pengembangan Karir

- Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
- Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
- Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;

- f) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;

2) Aspek Promosi dan Mutasi

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;

Oleh karena itu upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan guna pemenuhan beberapa sub aspek tersebut di atas adalah sebagai berikut:

o Tahun 2021

Di penghujung tahun 2021 pemkab telah menerbitkan peraturan bupati tentang pola karir dan pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian dari KASN, dokumen yang diupload belum ternilai.

o Tahun 2022

a. Sebagai langkah tindak lanjut dari kegiatan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, BKPSDM telah menyusun dokumen Pemetaan Pola Karir sekaligus mereview perbup tentang Pola Karir

b. peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring dengan konsep:

1) coaching dilakukan dengan menugaskan pegawai lintas Perangkat Daerah untuk peningkatan kompetensi teknis

2) mentoring dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi (Perangkat Daerah)

o Tahun 2023

Rencana tindak lanjut BKPSDM terhadap indikator sasaran indeks sistem merit yang belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Dengan anggaran tersedia BKPSDM telah melakukan asesmen (CAT Potensi bekerja sama dengan BKD Provinsi Jawa Tengah) untuk seluruh pejabat eselon III, IV dan beberapa Pejabat Fungsional serta pelaksana sejumlah 464 pegawai. Selanjutnya BKPSDM juga akan mengirim 9 pegawai untuk mengikuti asesmen bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah.
2. BKPSDM bekerja sama dengan Dinkominfo dalam mengembangkan aplikasi Sinta Merit yang merupakan aplikasi untuk mendukung penerapan sistem merit terutama dalam hal manajemen talenta. BKPSDM juga telah bekerja sama dengan Dinkominfo dalam mengembangkan aplikasi penilaian kinerja 360° yang juga untuk mendukung penerapan sistem merit dalam aspek manajemen kinerja.
3. BKPSDM telah menyusun draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mendukung dua aspek sistem merit yaitu aspek penggajian, penghargaan dan disiplin serta aspek perlindungan dan pelayanan.

Aspek pada indikator *merit system* bukan hanya dikawal oleh BKPSDM tetapi juga oleh Bagian Organisasi Setda yaitu dalam kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan, peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- Indikator persentase perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas
Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan ke jabatan fungsional serta penerapan Sistem Merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas. Namun dengan makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas maka perlu

memberi kesempatan yang sama dalam peningkatan kompetensi, khususnya bagi perempuan sehingga diharapkan bisa meningkatkan persentase perempuan pada JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

- Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian
 Pada triwulan I 2023 update data yang sudah selesai diverifikasi baru data pegawai CPNS yang baru diangkat menjadi PNS. Sebagian besar data dukung terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM.
- Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
 Hal ini disebabkan karena terjadinya kasus pada akhir Triwulan I tahun 2023 sehingga pada saat tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.
- Indikator persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.
 Hal ini disebabkan karena pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sudah purna tugas (pensiun) dan adanya promosi pejabat struktural (Pejabat yang promosi ke jenjang lebih tinggi meskipun yang bersangkutan sudah mengikuti diklatpim pada eselon di bawahnya tidak dihitung lagi keikutsertaan diklatpimnya). Hal ini jika dibandingkan dengan anggaran untuk pengiriman diklat kepemimpinan yang setiap tahunnya statis sebanyak kurang lebih 30 orang tidak signifikan untuk mengimbangi jumlah pejabat struktural yang pensiun dan promosi.
- Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
 Sejak tahun 2020 dengan adanya Covid -19 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF karena refocusing covid 19, sehingga mengurangi target peserta bimtek dan berdampak pada capaian indikator di tahun 2023

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung antara lain :

a) Bidang Kepegawaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan I Tahun 2023 masih rendah yaitu di angka 53,16 atau jika dalam nilai prestasi kerja masih pada kategori sangat rendah (≤ 60). Hal ini disebabkan karena belum terkoneksi data kepegawaian dengan perhitungan indeks, dan belum semua pegawai melakukan update dan upload data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan salah satu aspek dalam dimensi penilaian IP ASN. Pencapaian skor paling rendah ada pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 32%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian IP ASN.

Belum maksimalnya capaian Indeks Sistem Merit yang mana pada Triwulan I Tahun 2023 hasil penilaiannya sebesar 0,482 atau masih berada pada kategori III (0,41-0,6) dengan status kurang. Kabupaten Temanggung masih dibawah 12 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang kemarin menyabet penghargaan dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Temanggung belum mempunyai kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit, serta masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelaksana manajemen ASN.

b) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Penurunan persentase kompetensi diklat kepemimpinan yang mana jumlah pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sampai dengan Triwulan I tahun 2023 tercapai 26,80% lebih

rendah 8,2% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 35%. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, serta penyetaraan dalam jabatan fungsional. Promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada setiap jenjang.

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan upaya mengatasinya sebagai berikut:

- a) Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.
- b) Tindak lanjut upaya pencapaian target system merit adalah pada tahun 2023, telah diasesmen (CAT Potensi BKD Provinsi Jawa Tengah) 464 pegawai dan 9 pegawai akan diasesmen di Polda Jawa Tengah. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja 360° untuk aspek manajemen kinerja. BKPSDM menyusun draft Perbup tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi ASN di Temanggung untuk aspek penggajian, penghargaan dan disiplin serta aspek perlindungan dan pelayanan.
- c) Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda, sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp50.000.000,00
2. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Kepegawaian daerah sebesar Rp237.000.000,00 yang terdiri dari
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp198.000.000,00 ;
 - b. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp39.000.000,00 yang terdiri dari:
 - i. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp20.000.000,00
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp10.000.000,00
 - iii. Sub Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp9.000.000,00
3. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Pengembangan SDM, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp24.000.000,00

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	KEPEGAWAIAN						1	KEPEGAWAIAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	3.599.910		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	3.599.910	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.999.500		- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.999.500	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	20.000.000		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	20.000.000	
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	41.995.000		- Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	41.995.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sananya	12	Laporan	50.000.000		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sananya	12	Laporan	50.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	38.989.400		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	38.989.400	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	38.989.400		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	38.989.400	
2.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda						4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	80.000.000		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	80.000.000	
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.500		- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.500	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	25.000.000		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	25.000.000	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	0		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	50.000.000	Rehab atap dan ruang kantor

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.957.520		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.957.520	
B.	Program Kepegawaian Daerah						B.	Program Kepegawaian Daerah						
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	202,765,000		- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	202,765,000	
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	dokumen	28,252,000		- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	dokumen	28,252,000	
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	dokumen	25,104,000		- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	dokumen	25,104,000	
2	Mutasi dan Promosi ASN						1.	Mutasi dan Promosi ASN						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750	dokumen	39,408,000	2.	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750	dokumen	39,408,000	
	- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan promosi	6	dokumen	175,000,000		- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan promosi	6	dokumen	175,000,000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN						3.	Pengembangan Kompetensi ASN						
	- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jml dokumen pengelolaan assessment	1	dokumen	1,171,000,000		- Pengelolaan Assesment Center	Kab. Temanggung	Jml dokumen pengelolaan assessment	1	dokumen	1,171,000,000	
	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	orang	0		- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	orang	198,000,000	Bantuan Tugas Belajar
	- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	25,571,500		- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	25,571,500	
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	dokumen	31,181,600		- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	dokumen	31,181,600	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	laporan	15,000,000		-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	laporan	35,000,000	Medical Check up
	- Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	orang	25,488,400		- Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	orang	35,488,400	Keg. Sosialisasi dan Cetak Id Card
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	laporan	0		- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	laporan	9,000,000	Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Disiplin
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum							Pengembangan Kompetensi Teknis -						
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400	orang	291,026,000		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400	orang	315,026,000	Kepesertaan Ujikom PPK

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	laporan	1,829,373,000		-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	laporan	1,829,373,000	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-File	ASN	--	ASN mengubah semua file kepegawaian dalam bentuk digital dengan format PDF. File tersebut di upload di E-File melalui akun masing-masing ASN. File tersebut akan di download admin sesuai kebutuhan untuk proses upload pada saat pelayanan kepegawaian di BKN secara online	Tersedianya <i>Soft file</i> kepegawaian ASN	Mempercepat proses layanan kepegawaian yang dilakukan melalui aplikasi BKN yang sudah mulai mengurangi layanan dengan berkas (paperless) seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan / Pensiun	Diskominfo & BKPSDM / 2020
2	Pengembangan Mutasi Pegawai	BKPSDM	APBD	BKPSDM menginput nominasi pegawai yang akan promosi dan pegawai yang akan mutasi. Tim Penilai Kinerja melakukan penataan pegawai. Selanjutnya Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Tim Penilai Kinerja	Tersedianya Aplikasi Penataan Pegawai di Lingkungan Pemkab Temanggung	Meningkatnya akurasi penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, syarat jabatan, dan kompetensi yang dimiliki.	CV. Indotech Solution, Magelang Tahun 2020
3.	Pemutakhiran E-SKP	ASN	--	ASN memasukkan butir-butir kegiatan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jenis jabatan ASN ke aplikasi E-Kinerja pada modul SKP melalui akun masing-masing ASN. SKP yang di masukkan sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) masing-masing ASN. Kinerja	Integrasi SKP dengan kinerja pegawai	Mengintegrasikan butir kegiatan SKP dengan kinerja ASN, sehingga SKP ASN akan sinkron dengan kinerja hariannya dan dapat dinilai secara periodik.	Dinkominfo & BKPSDM / 2021

				pegawai bisa dimasukkan apabila sasaran SKP sudah dimasukkan.			
4	KOMPAK (Komunikasi Kepegawaian) Centre	BKPSDM		Merupakan suatu wadah untuk ASN Kabupaten Temanggung berbentuk Podcast pada Alamat Youtube BKPSDM Temanggung. Dengan adanya KOMPAK CENTRE diharapkan ASN Kabupaten Temanggung dapat menerima informasi terkait aturan dan layanan kepegawaian tanpa harus datang ke BKPSDM namun hanya dengan mendengarkan dan melihat podcast di Youtube BKPSDM.	Tersedianya layanan informasi BKPSDM melalui media podcast	Inovasi tersebut merupakan salah satu resolusi BKPSDM yaitu pelayanan kepegawaian berbasis digital dan untuk menuju <i>Smart ASN</i> .	BKPSDM 2021
5	Dataku Tanggung Jawabku	ASN	--	Latar belakangnya masih banyak ASN yang kurang, bahkan tidak peduli dengan datanya sendiri. ASN berpangku tangan dan menyerahkan semua tanggung jawab data kepegawaiannya kepada pengelola kepegawaian. Akibatnya, jika data kepegawaian tidak update dan tidak lengkap maka: <ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses kenaikan pangkat - Menghambat proses pensiun - Menjadi faktor kesalahan dalam pengambilan kebijakan - Menghambat proses ijin belajar - Menghambat penyesuaian gelar pendidikan, dll 	Meningkatnya kepedulian ASN terhadap pentingnya data kepegawaian	Inovasi ini dalam rangka mengoptimalkan Aplikasi SIMPEG BKPSDM dan layanan kepegawaian yang semakin <i>go green/paper less</i> .	BKPSDM 2022

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19
Daftar Penghargaan BKPSDM Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Peringkat Terbaik ke-3 dalam Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian Tahun 2021	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta	BKPSDM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BKPSDM;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM dalam rangka akuntabilitas kinerja BKPSDM.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tinggi		Indeks Merit System	Angka Indeks	0,50	0,50
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka Indeks	53,18	53,18
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	41,39	41,39
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	%	86,5	86,5
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,18	96,18

Sumber : Renstra BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran BKPSDM Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	6.256.382.674,-	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	6.256.382.674,-	-127.000.000,-
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.280.612.174,-	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.280.612.174,-	0,-
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.681.416.844,-	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.681.416.844,-	0,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.681.416.844,-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.681.416.844,-	0,-
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.594.410,-	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.594.410,-	0,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.910,-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.910,-	0,-
	Penyediaan Logistik Kantor	19.999.500,-		Penyediaan Logistik Kantor	19.999.500,-	0,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,-	0,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.995.000,-		Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.995.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,-	0,-
c..	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.605.900,-	c..	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.605.900,-	0,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	0,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.606.900,-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.606.900,-	0,-
d..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	d..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	80.000.000,-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	80.000.000,-	0,-
	Pemeliharaan Mebel	1.997.500,-		Pemeliharaan Mebel	1.997.500,-	0,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,-	0,-

	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,-		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,-	0,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.997.520,-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.997.520,-	0,-
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.975.770.500,-	2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.848.770.500,-	-128.000.000,-
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	256.121.000,-	a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	306.121.000,-	0,-
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	202.765.000,-		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	202.765.000,-	0,-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.252.000,-		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.252.000,-	0,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.104.000,-		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.104.000,-	50.000.000,-
b.	Mutasi dan Promosi ASN	214.408.000,-	b.	Mutasi dan Promosi ASN	214.408.000,-	0,-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	39.408.000,-		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	39.408.000,-	0,-
	Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000,-		Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000,-	0,-
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.394.571.500,-	c.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.216.571.500,-	-178.000.000,-
	Pengelolaan Assessment Center	1.171.000.000,-		Pengelolaan Assessment Center	1.171.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	198.000.000,-		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000,-	-178.000.000,-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.571.500,-		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.571.500,-	0,-
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	110.670.000,-	d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	111.670.000,-	1.000.000,-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.181.600,-		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.181.600,-	0,-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,-		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,-	-20.000.000,-
	Pembinaan Disiplin ASN	35.488.400,-		Pembinaan Disiplin ASN	56.488.400,-	21.000.000,-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.000.000,-		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.000.000,-	0,-
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.144.399.000,-	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.944.399.000,-	-200.000.000,-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.144.399.000,-		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.944.399.000,-	-200.000.000,-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	315.026.000,-	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	315.026.000,-	-200.000.000,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	315.026.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	115.026.000,-	-200.000.000,-

	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.829.373.000,-	2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.829.373.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.829.373.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.829.373.000,-	0,-
	JUMLAH	8.400.781.674,-		JUMLAH	8.073.781.674,-	-327.000.000,-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp327.000.000,00 dari semula pagu Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 sebesar Rp8.400.781.674,00 menjadi sebesar Rp8.073.781.674,00 pada pagu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Nilai Pagu Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 sebesar Rp8.400.781.674,00 ini didapatkan setelah dilakukan analisis kebutuhan tambahan anggaran yang perlu diusulkan karena belum terakomodir sebesar Rp311.000.000,00 dari nilai pagu Rancangan Awal BKPSDM Tahun 2024 yang semula sebesar Rp8.089.781.674,00.

Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan pagu indikatif Tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, berikut rinciannya:

1. Program Kepegawaian Daerah terjadi penurunan anggaran sebesar Rp128.000.000,00
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terjadi penurunan anggaran sebesar Rp200.000.000,00

Dari nilai pagu indikatif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp8.073.781.674,00 ini telah dilakukan penambahan anggaran beberapa sub kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya antara lain:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp50.000.000,00 yang akan digunakan untuk rehab atap dan ruang gedung kantor BKPSDM.
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp50.000.000,00 untuk melakukan pengembangan aplikasi SIMPEG.
3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp20.000.000,00 untuk bantuan tugas belajar.
4. Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp21.000.000,00 untuk kegiatan Sosialisasi dan cetak Id Card pegawai.
5. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp9.000.000,00 untuk kegiatan tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin.

Pada bulan Juni 2023 telah diinput pada aplikasi SIPD RI pagu indikatif Renja BKPSDM Tahun 2024 dengan total nilai pagu

sebesar Rp8.073.770.663,00 (lihat Tabel 4.2) dimana ada selisih kurang sebesar Rp11.011,00 dengan pagu indikatif RKPD Kabupaten Temanggung yang nilainya Rp8.073.781.674,00 (lihat Tabel 4.1). Selisih tersebut merupakan jumlah nilai yang sisa yang tidak bisa terinput karena adanya proses penyesuaian dengan standar satuan harga pada penyusunan RKA. Maka pagu indikatif Renja dan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan adalah sesuai jumlah nominal yang sudah diinput dalam aplikasi SIPD RI yaitu sebesar Rp8.073.770.663,00 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158.995.019,00					174.894.522,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19 Unit	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	88.000.000,00
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
					-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	353 Unit	-	1.997.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	353 Unit	2.197.250,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	408 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	408 Unit	27.500.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	49.999.999,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.000.000,00
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Unit	-	1.997.520,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	2.197.272,00

5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.848.770.500,00					1.678.431.500,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						306.121.000,00					174.639.000,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	202.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	117.235.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian											
					-	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Dokumen	-	28.252.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	27.302.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5000 Dokumen	-	75.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	30.102.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						214.408.000,00					195.640.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
					-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	750 Dokumen	-	39.408.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokumen	20.640.000,00
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	175.000.000,00

5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							1.216.571.500,00					1.188.700.000,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center												
					-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.171.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	945.400.000,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
					-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang	216.000.000,00
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional												
					-	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	25.571.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 Orang	27.300.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							111.670.000,00					119.452.500,00
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	31.181.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	33.964.100,00
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	35.988.000,00

5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN													
					-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300 Orang	-	56.488.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300 Orang	40.500.400,00	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	9.000.000,00	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.944.399.000,00					2.145.154.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1.944.399.000,00						2.145.154.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							115.026.000,00						315.781.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
					-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	115.026.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	315.781.000,00	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.829.373.000,00					1.829.373.000,00	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
					-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	1.829.373.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1.829.373.000,00	
TOTAL											8.073.770.663,00						8.164.513.197,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BKPSDM Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BKPSDM itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BKPSDM Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 82,33 %, realisasi Belanja Modal sebesar 94,79 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 18,62 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 BKPSDM mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp8.073.770.663,00, yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran BKPSDM dapat tercapai

sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 03 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Temanggung,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP/19660608 199603 2 004



BKPSDM Kabupaten Temanggung

